

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih, omzet, dan jumlah karyawan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan UMKM sebagai dasar perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan bahwa fakta UMKM ini dapat dijalankan oleh setiap orang tanpa memerlukan modal yang besar, sehingga bagi mereka yang ingin menjalankannya dapat membantu penyerapan tenaga kerja, terutama bagi pelaku usaha itu sendiri. Ini akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup dengan mengurangi tingkat pengangguran (Mathematics, 2016).

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari perekonomian negara, termasuk Indonesia. Kriteria seperti jumlah aset, omzet, dan jumlah karyawan biasanya digunakan untuk

mendefinisikan UMKM. Masing-masing kategori memiliki definisi berikut :

1. Usaha Mikro :

- a. Memiliki modal usaha paling sampai dengan banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dengan usaha kecil.

2. Usaha Kecil :

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Biasanya dikelola oleh individu atau kelompok dengan beberapa karyawan.

3. Usaha Menengah :

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Dikelola dengan organisasi yang lebih formal dan terstruktur, serta jumlah karyawan yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha kecil.

2.2 Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Terhadap UMKM

2.2.1 Fasilitator dan Regulator

Untuk UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal membantu mereka mendapatkan modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Dinas ini membantu dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan bantuan permodalan. Pelatihan yang relevan kebutuhan UMKM seperti manajemen, pemasaran, dan produksi disediakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan. Selain itu, pihak dinas juga memberikan pinjaman modal berupa pinjaman lunak atau bantuan secara langsung. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

2.2.2 Dukungan Pemasaran

Memberikan dukungan untuk rencana pemasaran produk UMKM, termasuk instruksi tentang pemasaran digital dan penggunaan media sosial untuk memperluas demografi pelanggan. Pemasaran, pelatihan keterampilan, dan membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengakses pasar yang lebih luas melalui pameran dan promosi digital adalah semua sumber daya yang diberikan oleh dinas

ini. Menyediakan sarana pemasaran seperti pameran, bazar, dan promosi digital untuk membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan.

2.2.3 Evaluasi dan Monitoring

Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan untuk memastikan apakah mereka efektif dan berdampak pada pertumbuhan UMKM. Untuk mengetahui kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dinas melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap program dan kegiatan yang ditujukan untuk UMKM. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi efektivitas program dan memberikan masukan untuk perbaikan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, bekerja sama dengan berbagai organisasi, baik pemerintahan maupun swasta. Mengadakan forum atau pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi oleh UMKM dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dengan melakukan peran ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sangat membantu pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

2.2.4 Kebijakan Dalam Pengembangan UMKM

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu Undang-Undang yang menjadi landasan adalah Peraturan Wali Kota Tegal nomor 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan hambatan administratif. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM melalui program pelatihan yang diatur dalam undang-undang.

2.3 Program Pengembangan UMKM

2.3.1 Program dan Pelatihan Pengembangan Keterampilan

Memberikan pelaku UMKM pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan keuangan. Program pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis yang terkait dengan industri seperti produk, pengolahan, dan teknologi informasi. Pada UMKM, program pengembangan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis dalam bidang manajemen, pemasaran, keuangan, dan teknologi, sehingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat mengelola usahanya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, program pelatihan juga dapat meningkatkan hubungan antara UMKM, pemerintah, dan lembaga pelatihan, sehingga terjadi kerjasama yang lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM.

2.3.2 Program Pemasaran

Untuk mempromosikan produk UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan mengadakan pameran, bazar, dan festival. Mendorong UMKM untuk memanfaatkan *platform e-commerce* dan digital untuk meningkatkan penjualan pasar. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan serta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencapai target pasar. Menurut kebutuhan dan karakteristik konsumen, UMKM perlu menentukan target pasar yang spesifik. Dengan memahami target pasar, pemasaran dapat lebih tepat sasaran.

2.3.3 Program Akses Pembiayaan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah yang membantu UMKM mendapatkan modal dengan memberikan pinjaman yang memiliki bunga rendah. Program yang memberikan dana bergulir untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di mana dana yang dikembalikan akan digunakan untuk membantu usaha lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal menyediakan fasilitas pembiayaan. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk membantu UMKM dalam siklus usahanya, seperti membeli bahan baku, membayar karyawan, atau membuat produk baru. Melalui program akses pembiayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal memiliki peran penting dalam mendorong

pertumbuhan UMKM. Diharapkan UMKM di Kota Tegal dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan dukungan dari pemerintah dan koperasi.

2.3.4 Kerjasama dan Kemitraan

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal menawarkan berbagai program kerjasama dan kemitraan, seperti bimbingan teknis, pelatihan, layanan pemasaran. Berbagai pihak bekerja sama dalam proyek ini, termasuk lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu sendiri. Untuk membantu UMKM mendapatkan modal, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas kredit bagi UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan juga menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menjamin bahwa program kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal sesuai dan menguntungkan bagi pelaku UMKM.

2.4 Tantangan Dalam Pengembangan UMKM

2.4.1 Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan merupakan masalah utama bagi pengembangan UMKM. Ini termasuk kurangnya akses ke lembaga keuangan formal, kurangnya pengetahuan tentang keuangan, dan persyaratan yang tidak sesuai dengan UMKM. Hal ini menyulitkan UMKM untuk mendapatkan modal kerja, investasi, dan mengembangkan bisnis mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan formal, meningkatkan pengetahuan UMKM tentang keuangan, dan menyediakan produk keuangan yang lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pada UMKM dalam hal pengelolaan keuangan dan manajemen usaha, pemerintah lembaga swadaya masyarakat dan komunitas bisnis lokal sangat diperlukan. Dengan mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan bisnis mereka.

2.4.2 Pemasaran dan Persaingan

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu pemasaran dan persaingan. Banyak UMKM yang masih bergantung pada pasar lokal dan belum memanfaatkan *platform* digital dengan baik, yang merupakan salah satu tantangan utama. Hal ini menyebabkan produk mereka kurang dikenal oleh pelanggan. Selain itu, UMKM harus berjuang mempertahankan pangsa pasar mereka karena persaingan yang semakin ketat, baik dari

pelaku usaha sejenis maupun dari produk impor. Banyak UMKM yang tidak memiliki strategi pemasaran yang baik, sehingga sulit untuk menarik pelanggan di tengah banyaknya pilihan. Meningkatkan daya saing juga dihalangi oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal keahlian finansial dan pemasaran kontemporer. Akibatnya, diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait untuk membantu UMKM dengan pelatihan pemasaran, akses ke teknologi, dan peningkatan jaringan distribusi.

2.4.3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama yang menghalangi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang teknologi, pemasaran, dan manajemen bisnis. Akibatnya, mereka sulit mengelola bisnis mereka dengan baik. Keterbatasan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang relevan, yang menghalangi mereka untuk mengikuti tren dan inovasi terbaru di pasar. Selain itu, karena gaji dan fasilitas yang ditawarkan oleh UMKM tidak sebanding dengan perusahaan besar, UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang terampil. Akibatnya, banyak UMKM terperangkap dalam praktik bisnis konvensional dan tidak dapat mengubah kebutuhan konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta harus

bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang baik di kalangan UMKM.

2.4.4 Teknologi dan Inovasi

Salah satu faktor yang menghambat daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif adalah tantangan yang menghalangi kemajuan mereka dalam teknologi dan inovasi. Banyak UMKM yang masih menggunakan metode tradisional dalam proses produksi dan pemasaran. Akibatnya, mereka kurang efektif dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. UMKM sulit berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka karena mereka tidak dapat mengakses teknologi modern seperti perangkat lunak manajemen, alat produksi canggih, dan *platform* digital. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi dalam bisnis membuat banyak pelaku UMKM enggan mengambil resiko atau mengadopsi teknologi yang lebih maju. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pengembangan produk dan layanan serta kesulitan dalam menarik perhatian pelanggan yang semakin menginginkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi.

2.4.5 Regulasi dan Kebijakan

Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menghadapi kesulitan untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan sanksi atau bahkan penutupan bisnis. Proses

perizinan yang sulit dan birokrasi yang berbelit-belit sering menjadi penghalang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan. Selain itu, kebijakan yang tidak konsisten atau kurang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap pembiayaan dan insentif pajak, dapat menghalangi pelaku UMKM untuk berinvestasi dan berinovasi. Sebaliknya, UMKM tidak terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, yang mengakibatkan regulasi saat ini tidak selalu memenuhi kebutuhan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku UMKM harus bekerja sama untuk membuat regulasi yang lebih baik dan mendukung serta memastikan bahwa suara UMKM didengar dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

2.4.6 Infrastruktur

Infrastruktur untuk pengembangan UMKM mencakup berbagai hal yang menghambat pertumbuhan usaha, seperti akses listrik, jalan, dan internet yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan. Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) beroperasi di wilayah yang memiliki infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak, akses transportasi yang terbatas, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti pasar, pusat distribusi dan teknologi informasi. Keterbatasan infrastruktur ini meningkatkan biaya operasional, menyulitkan distribusi produk, dan membatasi akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kurangnya akses ke layanan dasar seperti listrik dan internet

menghalangi UMKM untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini membuat UMKM sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur (Islam & Eriyanti, 2024).

2.4.7 Ketidakpastian Ekonomi

Dalam hal ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting terutama di dunia yang tidak menentu saat ini. Perubahan permintaan pasar yang dapat disebabkan oleh ketidakpastian ini, yang berdampak langsung pada pendapatan dan keberlangsungan bisnis (No et al., 2023). Selain itu, UMKM yang biasanya memiliki modal dan sumber daya terbatas, menghadapi tantangan tambahan karena perubahan kebijakan ekonomi, inflasi, dan kenaikan harga bahan baku. Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam merencanakan strategi jangka panjang, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keadaan seperti ini. Akibatnya, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka di pasar. Oleh karena itu, akses yang lebih baik ke pembiayaan dan pelatihan manajemen risiko diperlukan untuk membuat UMKM menjadi lebih tangguh saat ekonomi tidak stabil, yang harus dibantu oleh pemerintah dan lembaga keuangan.

2.4.8 Kesadaran dan Literasi

Kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka sangat

dipengaruhi oleh tantangan kesadaran dan literasi. Banyak pelaku UMKM tidak memahami manajemen keuangan, pemasaran, dan aspek hukum yang berkaitan dengan bisnis mereka. Mereka yang kurang memahami keuangan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengelola arus kas mereka, membuat keputusan investasi yang tepat, memahami produk keuangan yang tersedia, dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Selain itu, UMKM gagal bersaing di pasar yang semakin kompetitif karena kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi dan penggunaan teknologi dalam bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan dan edukasi. Ini akan memungkinkan pelaku UMKM untuk memaksimalkan potensi usaha mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian saat ini.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menambah acuan teori dalam penyajian masalah yang dipaparkan. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk penyusunan Tugas Akhir, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dari berbagai jurnal terkait :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhimmatul Adzimah (2020)	Peranan dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Terhadap Pengembangan UKM dan Koperasi di Kabupaten Tegal	Deskriptif Kualitatif (dokumentasi, wawancara, studi pustaka)	Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Terhadap Pengembangan UKM dan Koperasi Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UKM dan Koperasi di Kabupaten Tegal memiliki beberapa hambatan saat pelaksanaannya. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal

memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang ditukan kepada pelaku usaha dan koperasi, karena keduanya memiliki peran penting dalam menyusun ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung.

2.	Nuraliah, Muh. Muzani Zulmaizar, Rahmah Muin (2022)	Peran Dinas Koperasi Dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Dinas	Deskriptif Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Koperasi Dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada
----	---	---	---	---

Perindustrian	Dinas Perindustrian
Perdagangan	Perdagangan
Koperasi Dan	Koperasi Dan UKM
UKM	Kabupaten Polewali
Kabupaten	Mandar). Penelitian
Polewali	ini dapat menarik
Mandar)	kesimpulan bahwa
	Pengembangan
	UMKM unggulan
	tidak lepas dari peras
	Dinas Koperasi dan
	UMKM yang telah
	disepakati dan turun
	tangan langsung ke
	lapangan dalam
	bentuk berbagai
	kebijakan yang
	disusun pemerintah
	dan berbagai program
	yang dilaksanakan.
	Penyelenggaraan
	promosi produk
	UMKM dalam bentuk

					pameran menjadi salah satu contoh kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Polewali Mandar yaitu dengan menghadirkan seluruh pelaku yang produknya ada dalam pameran tersebut.
3.	Glori Handika (2019) (Monitoring et al., 2019)	Peran Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi	Deskriptif Kualitatif (observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam monitoring pedagang kaki lima di jalan Mayjen Sutoyo kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berjalan kurang	

Kabupaten Tegal	maksimal. Adapun
	kendala dalam
	monitoring pedagang
	kaki lima di jalan
	Mayjen Sutoyo
	kecamatan slawi
	Kabupaten Tegal
	secara garis besar
	yaitu belum
	tersedianya anggaran
	untuk membangun
	prasarana sarana
	pedagang kaki lima di
	tempat tujuan
	relokasi. Solusi yang
	akan ditempuh yaitu
	Pemerintah Daerah
	melalui Dinas
	Perdagangan,
	Koperasi dan UKM
	akan melakukan
	relokasi pedagang
	kaki lima tersebut

						secara bertahap
						dengan tetap
						berpedoman pada
						peraturan Bupati
						Tegal nomor 7 tahun
						2018 tentang
						penetapan lokasi dan
						penyiapan prasarana
						sarana usaha
						pedagang kaki lima di
						Slawi Kabupaten
						Tegal.
4.	R. Nurhayati, Ananta Prathama (2022)	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) “Kendang Jimbe” Di	Deskriptif Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi)			Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) “Kendang Jimbe” Di Kecamatan Kepanjenkidul Kota

Kecamatan	Blitar,	telah
Kepanjenkidul	ditemukan	hasil
Kota Blitar	bahwa	Dinas
	Koperasi, UKM, dan	
	Tenaga Kerja Kota	
	Blitar	telah
	menjalankan	peran
	sebagai	stabilisator
	melalui	pengawasan
	mutu produk dan	
	sosialisasi	akses
	bantuan permodalan	
	dengan cukup baik.	
	Kemudian terakhir	
	dalam menjalankan	
	peran	dilakukan,
	didapatkan	bahwa
	Dinas	Koperasi,
	UKM, dan	Tenaga
	Kerja Kota Blitar	
	menjalankan	peran
	sebagai	pelopor
	dengan	mempelopori

pengadaan kegiatan bazar dan pameran sebagai upaya promosi terhadap produk UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe”. Pameran ini diikuti oleh produk-produk UMKM dari Kota Blitar dimana salah satunya yang mendapat banyak perhatian adalah “Kendang Jimbe”.

5.	S. Audina (2021)	Peranan	Deskriptif	Penelitian ini
		Pelatihan	Kualitatif	bertujuan untuk
		Terhadap	(observasi,	mengetahui pelatihan
		Pengembangan	wawancara)	dan pengembangan
		Pelaku Usaha		yang dilakukan oleh
		Kecil Dan		Dinas Koperasi
		Menengah Pada		Usaha kecil dan
		Dinas Koperasi		Menengah. Jenis

Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang	penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat meningkatkan skill (kemampuan) pelaku UKM serta menghasilkan produktivitas secara efektif dan efisien. Adapun bentuk pengembangan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM
--	--

meliputi bidang perizinan, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi serta menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahunnya, ini membuktikan banyaknya pelaku UKM yang mengikuti Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

6.	Muhammad	Peran Dinas	Deskriptif	Penelitian ini ingin
	Rahul Zidane,	Koperasi,	Kualitatif	mempelajari peran
	Nurul Umi Ati,	Perindustrian,		Dinas Koperasi,
	Taufiq Rahman	Dan		Perindustrian, dan
	Ilyas (2024)	Perdagangan		Perdagangan Kota
		Kota Malang		Malang dalam
		Dalam		pengembangan
		Pengembangan		UMKM di Kota
		Umkh Di Kota		Malang. Dari hasil
		Malang (Studi		penelitian yang
		Kasus Di Sentra		dilakukan oleh
		Industri Keripik		peneliti, bahwa
		Tempe Sanan,		DISKOPINDAG
		Kota Malang)		Kota Malang telah
				berperan aktif dalam
				melakukan
				pengembangan
				UMKM yang ada di
				Kota Malang pada
				umumnya dan Sentra
				Industri Keripik
				Tempe Sanan pada
				khususnya dengan

dibuktikan beberapa
penemuan yang
peneliti temukan di
lokasi penelitian
berdasarkan indikator
penelitian.
